

**SYARAT USIA CAPRES DAN CAWAPRES DI INDONESIA
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
(STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 90/PUU-XXI/2023)**

SKRIPSI

Oleh

Achmad Mutawakil Awaludin

NIM. 05020420022



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Tata Negara
Surabaya
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Mutawakil Awaludin
Nim : 05020420022
Fakultas/Prodi: Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Syarat Usia Calon Presiden & Calon Wakil Presiden Di
Indonesia Persepektif Fiqih Siyasah (Studi terhadap putusan
Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian dirujuk sumbernya.

Gresik, 12 Desember 2024

Saya yang menyatakan



ACHMAD MUTAWAKIL AWALUDIN

NIM.05020420022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Achmad Mutawakil Awaludin
NIM. : 05020420022
Judul : SYARAT USIA CAPRES DAN CAWAPRES DI
INDONESIA PRESPEKTIF FIQIH SIYASAH
(STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI
NO.90/PUU-XXI/2023)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 4 Desember 2024

Pembimbing,



Dr. Lutfil Ansori, S.H.I., M.H.
NIP. 198311132015031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

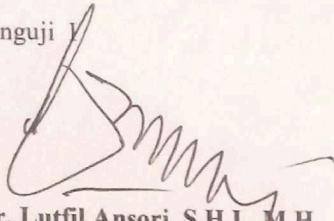
Nama : Achmad Mutawakil Awaludin

NIM : 05020420022

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

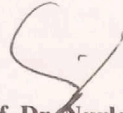
Majelis Munqasah Skripsi:

Penguji I



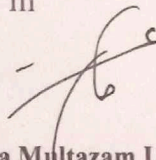
Dr. Lutfil Ansori, S.H.I., M.H.
NIP. 198311132015031001

Penguji II



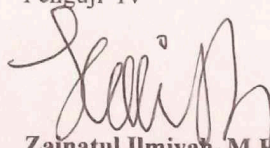
Prof. Dr. Nurlailatul Musyafaah, Lc., M. Ag.
NIP. 197904162006042002

Penguji III



Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H.
NIP. 198611092019031008

Penguji IV



Zainatul Ilmiyah, M.H.
NIP. 1993021520201212020

Surabaya, 07 Januari 2025
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. Hj. Syarifah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 6303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Achmad Mutawakil Awaludin
NIM : 05020420022
Fakultas/Jurusan : FSH / Hukum Perdata Islam
E-mail address : didinawaludin1010@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

SYARAT USIA CAPRES DAN CAWAPRES DI INDONESIA
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (STUDI TERHADAP
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXIV/2023)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 Januari 2025

Penulis



[Handwritten Signature]

DIDIN

nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Sebagai syarat menjadi Presiden dan Wapres di Indonesia, seseorang harus memenuhi kriteria tertentu, salah satunya adalah memiliki batas usia. Kriteria ini tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 berasal dari Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu. Rumusan masalah pada riset yang dilaksanakan ini adalah Bagaimana persyaratan umur capres dan cawapres sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023? Bagaimana pemikiran fiqh siyasah terhadap persyaratan umur capres dan cawapres yang ada pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023?

Riset kaidah normatif yang dipakai pada riset ini mempunyai ciri kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode *library research* yang datanya diambil dari referensi tulis lainnya yang signifikan dengan riset ini. Bahan hukum yang dipakai ada 2, yaitu hukum yang mengikat kaidah dasar yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait Pemilu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, dan Undang-Undang lain yang berkaitan persyaratan umur capres dan cawapres. Bahan jurnal hukum yang mencakup Undang-Undang, hasil riset, juga dari Al-Quran, hadits, referensi mengenai ilmu hukum, karangan ilmiah teoritis, jurnal. Terdapat 3 pendekatan riset, yaitu pendekatan Undang-Undang, pendekatan konseptual dan pendekatan historis.

Output riset ini mengungkapkan maka secara keseluruhan dari analisis peneliti mengenai syarat umur capres dan cawapres dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tetap sejalan dengan prinsip hukum Islam, dimana pada hukum Islam bukan adanya penetapan batas umur untuk menduduki jabatan pimpinan, melainkan syarat lainnya juga harus telah mencapai baligh. Hal ini sangat penting karena terdapat keseimbangan antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan kaidah Islam. Maka bisa disimpulkan secara umum syarat umur capres dan cawapres pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan umum signifikan kaidah Islam pada aturan syarat menjadi pimpinan.

Saran penelitian, Konsep kepemimpinan Islam perlu diterapkan di Indonesia, dari sikap pimpinan sampai kaidah pembenahan terkait aturan pimpinan di Indonesia perlu lebih diselaraskan dengan ajaran Islam.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Kajian Terdahulu.....	12
F. Definisi Operasional.....	18
G. Jenis Penelitian.....	21
H. Sistematika Penelitian.....	25
BAB II KONSEP KEPEMIMPINAN NEGARA MENURUT HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH.....	27
A. Konsep Kepemimpinan Negara Menurut Hukum Positif di Indonesia.....	27
B. Konsep Kepemimpinan Negara Dalam Pandangan Fiqih Siyasa.....	40
BAB III ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.90/PUU- XXI/2023 TENTANG SYARAT USIA CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.....	54
A. Deskripsi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.....	54
B. Syarat Usia Presien dan Wakil Presiden Didasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.....	59

BAB IV ANALISIS SYARAT USIA CAPRES DAN CAWAPRES DALAM PANDANGAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023.....	67
A. Analisis Batas Usia Capres dan Cawapres Pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 ditinjau dari Fiqih Siyasah.....	67
B. Analisis Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Batas Usia Capres dan Cawapres Ditinjau dari Fiqih Siyasah.....	76
BAB V KESIMPULAN.....	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	xcii
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	lxxxiv



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- A.M Mangunhardjana. Kepemimpinan. Yogyakarta: kanisius, 1996.
- Abbas Hasyim. Presiden Perempuan Perspektif Hukum Islam. Yogyakarta: Kutub, 2004.
- Ahmad Muhammad. Islam Landasan Alternative Administrasi Pembangunan. Jakarta: CV Raja wali, 1985.
- Al-Mawardi. Al-Ahkam As-Sultaniyyah, Terjemahan Fadli Bahri. Jakarta: Darul Falah, 2014.
- Anangkota Muliadi. Klasifikasi Sistem Pemerintahan Perspektif Pemerintahan Modern Kekinian, *Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol.3 No.2.*
- Arifin M. Syamsul. Pemimpin Ideal Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pemikiran Imam Al-Ghazali). Tesis Pascasarjana Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta, 2020.
- Baqi Muhammad Fuad Abdul. Al-Lu'lu' Wal Marjan. Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1995.
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemah. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Fajlurrahman Jurdi. Pengantar Hukum Pemilihan Umum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Furqan Muhammad. Kepemimpinan Perempuan (Studi Perbandingan Hukum Islam Dengan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum). Skripsi. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

- I. Kosim. *Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*. (Kementrian Agama Republik Indonesia, Lembaga Penelitian (Lemlit) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon 2011.
- Hasan Farid Nu'man. *Politik Islam, Memahami Politik Islam Sesuai Teks dan Konteks*, cet. 1. Depok: Tauhid Media Center, 2009.
- Hidayat Syaiful. *Tata Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*. *Tafaqquh; Vol. 1 No. 2, Desember 2013*.
- Iqbal Muhammad dan Amin Husein. *Pemikiran Politik Islam, Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Edisi revisi, cet. 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Iqbal Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Iskandar Syukur. *Kriteria Pemimpin Teladan Dalam Islam. (Analisis Kritis Terhadap Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits-hadits Nabi SAW)*. Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Jahrah M. Abu. *Aliran Politik dan Aqiqah Dalam Islam*, alih bahasa Abd. Rahman dan Ahmad Qarib. Jakarta: logos, 1996.
- Kartono. *Kartini Pemimpin Dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Khallaf Abdul Wahhab. *Al-Siyasah al-Syar'iyah*. Kairo: Dar al-Anshar, 1977.
- Marcel A. Boisard. *L' Humanisme Del' Islam*, terj. M. Rasjdi, *Humanisme dalam Islam*, cet. 1. Jakarta: N. V. Bulan Bintang 1980.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Buku Aksara, 2016.

- Muhammad Abu Abdullah I. *Al-Jami li Ahkamil-Qur'an*. Jakarta: Darul Qalam, 1980.
- Muhammad Rusjdi Ali. *Politik Islam Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: BDI PT ARUN, BDI PIM dan YASAT, cet 1, 2000.
- Muntoha. *Kriteria Kepala Negara dalam Sistem Politik Islam (Telaah SosioHistoris Terhadap Hadits Politik)*. Laporan Penelitian. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta: 1996.
- Nasution Harun. *Islam Rasional, Gagasan dan Pemikiran*. Bandung: Penerbit Mizan, 1995.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023.
- Ramadhani Elina Putri. *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pemikiran Imam Al Mawardi Tentang Proses Pengangkatan Kepala Negara*. *Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun, 2020*.
- Rosana Ellya. *Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*. *Jurnal TAPIS Vol.12 No.1 Januari-Juni 2016*.
- Rasjid H. Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensido, 2003.
- Saebani Beni Ahmad. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Sjadali Munawir. *Islam Dan Tata Negara*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990.
- Soekanto Soejono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Syafiie, I. K. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- Syarif Mujar Ibnu dkk. *Fiqh Siyasah (Doktrin dan Pemikiran Politik Islam)*. Erlangga: 2008.

Syukur Iskandar. Kriteria Pemimpin Teladan Dalam Islam. (Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015).

Tobi Atussaadah. Perempuan Dan Eksistensi Kepemimpinan Dalam Islam. *Jurnal akademika*, vol.19 No.1 Tahun 2014.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 pasal 169. Tentang Persyaratan Menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.

UU RI. No. 3 Tahun 1999. Tentang Pemilihan Umum.

Yani Ahmad. Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. (Indonesian Government System: Theory and Practice Approaches of 1945' Constitution), *JKH Vol. 12 No. 2 Juli 2018*.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A